

THE ROLE OF DEPARTEMENT BINA MARGA OF RIAU PROVINCE IN THE MAINTENENCE STREET AND BRIDGE IN SIAK REGENCY 2017

Oleh : Uci Resty Pratama

Uciresty03@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Street and bridge are the main transportation access to support the society in doing daily activity. The street and bridge construction could be done in all areas, thereby the infrastructure construction especially in Siak Regency could be balanced. Riau Province infrastructure construction has not optimal yet for the province's street and bridge in Siak regency because there found worse in 2017. That is why the function of Dinas Bina Marga of Riau Province is important to collaborate optimally in their job description and function for keeping the street and the bridge in Siak regency, in order to increase economy development in Riau province. Hopefully, this research could be able to evaluate the duty of Dinas Bina Marga of Riau province in looking after the street and the bridge in Siak Regency. In doing this research, researcher used qualitative research method. Primary and secondary data are used in this research. Besides, researcher used interview and documentation for the data collection. The result is the function of Dinas Bina Marga has not optimal yet in taking care the street and the bridge, for the proof of it, the two programmes which are the rehabilitation for the street and the bridge also the inspection of the street are not well done yet. There are only two of six programmes has be done from rehabilitation, on the other side for the inspection that is only one a year finished in all of Riau province area.

Keywords : the function of Dinas Bina Marga, Taking care of Street and bridge, street and bridge rehabilitation and inspection.

PENDAHULUAN

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan. Salah satunya infrastruktur yang paling sering dipergunakan masyarakat adalah jalan. Jalan juga memiliki fungsi yang sangat besar untuk beraktivitas sehari – hari. Karena itu sangat dibutuhkan kondisi jalan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Keberadaan jalan yang bagus akan mempermudah masyarakat dalam bertransportasi dan juga memperlancar di bidang perekonomian dan jasa.

Adanya otonomi daerah, maka penyelenggaraan jalan Provinsi dipisahkan berdasarkan kewenangannya sebagaimana di atur menurut Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yaitu “Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan Provinsi”. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi. Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan mengenai jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹ Sedangkan Jembatan secara umum adalah suatu Konstruksi yang dibangun untuk melewati suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api atau pun jalan raya. Pasal 86 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jembatan adalah

jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.²

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri dari 3 urusan yaitu urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Infrastruktur termasuk ke dalam salah satu urusan Pemerintahan konkuren dimana urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota. Untuk urusan konkuren dibagi menjadi urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Pada pasal 12 di jelaskan Infrastruktur termasuk ke dalam urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar poin ke tiga yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.³

Jalan dan jembatan harus mendapat pemeliharaan dikarenakan kondisinya yang selalu mengalami kerusakan, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Dinas Bina Marga Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau adalah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas Bina Marga Provinsi Riau

¹ Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

² Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

³ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang ke-Bina Marga-an Provinsi Riau.

Dinas Bina Marga Provinsi Riau Mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebinamargaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Bina Marga Provinsi Riau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan;
- b. Perencanaan program kerja Kebinamargaan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang jalan dan jembatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat akibat bencana alam di bidang kebinamargaan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.⁴

Dari penjelasan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Provinsi Riau di atas yang termasuk ke dalam tugas pemeliharaan jalan ialah :

1. Perencanaan program kerja Kebinamargaan
2. Pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan

serta pemeliharaan jalan dan jembatan

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan;

Perlu adanya pemeliharaan jalan dalam bentuk rehabilitasi bersamaan dengan pemeliharaan rutin dan berkala khususnya pada jalan Simpang Minas – Simpang Pemda, Desa Tualang Timur dikarenakan jalan yang juga terdapat adanya jembatan sudah mempunyai umur pelayanan kurang lebih 8 tahun mengalami kerusakan parah yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian atau tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak. Seiring berjalannya waktu keadaan jalan Provinsi di Kabupaten Siak ini menjadi sangat memprihatinkan dibuktikan dengan timbulnya beberapa fenomena yang terjadi seperti banyaknya kecelakaan akibat banyak ditemukan kerusakan jalan dan jembatan, sepanjang jalan tersebut dijadikan tempat muda mudi untuk melakukan tindakan asusila dikarenakan penerangan jalan umum yang merupakan bagian dari fasilitas jalan tidak lagi berfungsi. Dapat dijabarkan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya fenomena tersebut di antaranya :

1. Masih banyak ditemukan permukaan jalan yang mengalami kerusakan parah, berlobang dan bergelombang di sepanjang jalan Pemda dan jembatan Maredan.
2. Kurangnya kecepatan respon atau tanggapan terkesan mengulur waktu dari pihak berwenang sehingga menimbulkan kerusakan yang semakin parah.
3. Banyaknya ditemukan kerusakan berat akibat banyaknya muatan berlebih bebas melewati jalan dan jembatan disebabkan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan jalan dan

⁴ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau

jembatan provinsi di Kabupaten Siak.

Berikut adalah jumlah jalan provinsi yang mengalami kerusakan di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau :

4. Tabel 1.2. Rekapitulasi kerusakan jalan provinsi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)
1	Rokan Hilir	10,3	105,33
2	Dumai	0,80	63,2
3	Bengkalis	1,70	0,00
4	Kepulauan Meranti	24	69,59
5	Siak	4,15	3,15
6	Indragiri Hilir	13,75	119,07
7	Pelalawan	7,10	194,09
8	Indragiri Hulu	3,9	38,30
9	Kuantan Singingi	0,30	65,86
10	Pekanbaru	13,75	20,45
11	Kampar	8,10	66,54
12	Rokan Hulu	29,5	96,38

Sumber : Data Olahan Penelitian

Hal ini merupakan suatu bukti bahwasannya dari beberapa tugas pokok dan fungsi dari Dinas Bina Marga belum maksimal dalam mencapai tujuan dimana fenomena tersebut adalah poin pokok yang menjadi fungsi dari dinas Bina Marga Provinsi Riau yaitu poin d.

Adapun program pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau meliputi program – program yang menjadi penunjang dari tugas dan fungsi SKPD bersangkutan yang termasuk program pemeliharaan jalan dan jembatan, antara lain :

- a. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Program inspeksi jalan dan jembatan.⁵

Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang ditemukan pada jalan milik Provinsi, berikut data kondisi jalan Provinsi :

Tabel 1.3. Data Kondisi Jalan Provinsi Riau 2014 - 2017

No	Tahun Anggaran	Panjang (KM)	Baik	Sedang	Rusak Ringan
1	2014	3033,32	30,73%	31,65%	17,22%
2	2015	3033,32	38,02%	24,94%	12,65%
3	2016	3033,32	43,88%	19,19%	13,55%
4	2017	2799,81	49,45%	8,99%	5,31%

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Riau 2014 -2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 tingkat kerusakan dengan kategori rusak berat masih terus meningkat, hal ini bisa jadi disebabkan karena tidak maksimalnya pelaksanaan dalam pemeliharaan jalan milik Provinsi oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau karena belum memadainya kinerja aparatur dan kelembagaannya dan hanya melakukan Pemeliharaan dan penanganan jalan tiap tahunnya masih mengacu kepada skala prioritas sehingga belum dapat memenuhi penanganan bagi keseluruhan panjang jalan provinsi sepanjang 3.033,32 Km sehingga tidak mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jalan Provinsi di Kabupaten Siak ini

⁵ RENSTRA, Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun 2014-2018

juga merupakan jalan menuju jalan nasional, jalan ini juga menghubungkan Siak, Meranti dan Bengkalis, bahkan Kota Dumai. Selain itu Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kota istana, Siak merupakan salah satu kawasan cagar budaya serta pusat pemerintahan kesultanan yang sudah diakui.

Jika dibandingkan jalan nasional dengan jalan provinsi yang ada di Provinsi Riau, jalan provinsi lebih banyak jumlahnya dari jalan nasional. Hal ini tentu mempengaruhi dari segi anggaran dimana anggaran jalan provinsi di tanggung dari APBD provinsi riau sedangkan jalan nasional di tanggung dari APBN.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Peran Dinas Bina Marga Provinsi Riau Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Siak Tahun 2017 ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Tugas Dinas Bina Marga Provinsi Riau Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Siak Tahun 2017.

KERANGKA TEORI

Manajemen Pemerintahan

Muhammad Ryas Rasyid mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan diarahkan agar terlebih dahulu mendefinisikan “hasil apa” yang ingin dicapai dengan uang, peralatan, keahlian, dan tenaga kerja yang dikerahkan. Ia berhubungan dengan target yang ingin dicapai oleh setiap unit dalam suatu periode tertentu. Manajemen pemerintah juga menganut prinsip – perinsip eektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang – orang memperoleh

dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan, dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.⁶

Pelaksanaan manajemen pemerintahan mencakup beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan kebijakan dan program

Perencanaan kebijakan dan program. Kegiatan ini didahului oleh penelitian dan analisa atas berbagai bidang permasalahan.

2. Pengorganisasian atas struktur pemerintahan

Pengorganisasian atas struktur pemerintahan yang mencakup upaya menjaga keserasian dalam hubungan antar departemen, membina keseimbangan antara otonomi dan integrasi, mengalokasikan program dan tanggung jawab secara vertikal dan horizontal, membina hubungan lini dan staf, memelihara hubungan antara kantor pusat dan unit-unit lapangan, memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong partisipasi.

3. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan yang mencakup penyeimbangan antara pembelanjaan dan penerimaan dalam proses penyusunan anggaran, pengalokasian uang dari hasil penerimaan ke unit-unit pemerintahan pada setiap tingkatan. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran, penerapan metode evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program dan ketaatan pada aturan yang berlaku, serta pendayagunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas.

4. Pembinaan dan pengembangan personil

Pembinaan dan pengembangan personil yang mencakup penyeleksian

⁶ Ryas Rasyid. 2004. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2000., hlm 148-149

calon, pengangkatan, penempatan, promosi, penegakan disiplin, dan pemberian insentif serta penghargaan. Dalam konteks pengembangan dilakukan pelatihan untuk pelayanan umum, pelatihan penjenjangan, pelatihan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang bersifat penyegaran. Penilaian atas prestasi unit kerja dan prestasi individual pegawai juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Ini dikembangkan dalam konteks kompetisi. Kepada mereka yang prestasinya tinggi, perlu diberi imbalan penghargaan dan promosi.

5. Pengambilan keputusan secara umum

Pengambilan keputusan yang secara umum berkenaan dengan pendefinisian masalah yang dihadapi, perumusan jalan keluar yang layak atas masalah, serta penentuan strategi untuk membangun dukungan bagi pemecahan masalah itu. Secara spesifik ia mencakup penentuan tujuan dan rencana untuk mencapainya, perumusan kebijakan, penugasan kepada siapa suatu kebijakan dipercayakan pelaksanaannya, penentuan strategi untuk pelaksanaan kebijakan, serta ketelitian dalam menaati prosedur administrasi dan hubungan hukum.

6. Program Pengelolaan

Program pengelolaan yang mencakup kepemimpinan, delegasi kewenangan, dan penugasan-penugasan yang lebih spesifik kepada unit-unit dan pejabat-pejabat, serta koordinasi.

7. Pengawasan politik

Pengawasan politik yang mencakup penegakan hukum, pertanggungjawaban publik, hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan, dan kepedulian pada etika pemerintahan yang berlaku.⁷

Manajemen Pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara dalam administrasi public untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang ada.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Bina Marga Provinsi Riau, khususnya di Jalan dan Jembatan Provinsi du Kabupaten Siak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Dinas Bina Marga Provinsi Riau Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Siak Tahun 2017

Peran Dinas Bina Marga Provinsi Riau dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Dinas Bina Marga Provinsi Riau merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang ke-Bina Marga-an Provinsi Riau.

Dinas Bina Marga Provinsi Riau Mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebinamargaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adapun penjelasan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang termasuk ke dalam pemeliharaan jalan ialah :

⁸ Zaidan Nawawi. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 21

⁷ Ryaas Rasyid, *Loc. Cit.*, Hlm 150-152

1. Perencanaan program kerja Kebinamargaan;
2. Pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan;

Untuk itu Dinas Bina Marga Provinsi Riau melakukan peran dalam pemeliharaan jalan dan jembatan khususnya di Kabupaten Siak dengan melihat tugas pokok dan fungsinya dengan melihat prinsip manajemen pemerintahan.

1. Perencanaan Program Kerja Kebinamargaan

Perencanaan adalah salah satu Fungsi Manajemen yang sangat penting. Sebuah perencanaan berpengaruh pada sukses atau tidaknya sebuah program kegiatan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu perencanaan bertujuan untuk menyusun prioritas penanganan jalan sesuai dengan dana yang tersedia dengan cara yang efisien agar menunjang pembangunan ekonomi dan sosial.

Adapun perencanaan program kerja bidang jalan dan jembatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan.

1.1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perencanaan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan oleh Dinas Bina Marga dilakukan setelah diadakannya rakornis

yaitu rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Bina Marga Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Program ini direncanakan berkonteks dalam merehab dan memelihara bagian jalan yang mana jalan yang mengalami kerusakan dan yang telah diusulkan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten/Kota. Proses perencanaan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan ini guna memilah jalan provinsi mana yang ada di Kabupaten/Kota untuk lebih di prioritaskan dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Sebagaimana wawancara dengan Ibuk Angraini Ekawati, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan mengatakan :

“untuk perencanaan program rehabilitasi ini ya itu tadi ada rapat intern setelah adanya rakornis, guna nya program ini kita usulkan untuk memilah jalan dan jembatan mana yang lebih kita prioritaskan untuk bisa masuk dalam daftar jalan dan jembatan yang patut sekiranya kita pelihara. Tergantung juga nanti kalau sudah kita buat program juga kegiatannya belum tentu semua bisa kita laksanakan, tentu kita juga harus menyesuaikan dengan anggaran, kalau tak ada anggaran bagaimana rencana yang sudah kita buat bisa terlaksana. Program ini kita usulkan kita rembukkan dengan tim kita, lalu kita ajukan ke dinas ya syukur syukur dana kita cukup agar bisa semua kita pelihara.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Angraini Ekawati, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan bahwa perencanaan program rehabilitasi/pemeliharaan ini dibuat setelah adanya rapat rakornis. Rapat intern yang dilakukan dinas bertujuan untuk membuat

program rencana dari permasalahan yang ditampung pada saat rakornis diadakan serta memilah jalan dan jembatan yang telah diusulkan setiap Dinas Bina Marga Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan untuk masuk ke dalam daftar kegiatan program yang dibuat oleh dinas yaitu program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Setelah perencanaan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan maka bidang mengusulkan ke kepala dinas untuk diterima dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

1.2 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Perencanaan program inspeksi kondisi jalan dan jembatan juga dilakukan setelah adanya rakornis dengan seluruh Dinas Bina Marga Kabupaten/Kota. Perencanaan program tersebut diusulkan setiap tahunnya dimana dalam setahun sekali harus dilaksanakan. Sebagaimana wawancara dengan Ibuk Angraini Ekawati, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan mengatakan :

“perencanaan program inspeksi kondisi jalan dan jembatan ini setiap tahunnya pasti kita usulkan, dalam rapat intern kita tetap mengusulkan program ini karna kita tidak hanya ingin melihat dari data yang ada malah kita ingin lihat langsung gimana kondisi yang diusulkan yang dikeluhkan apakah betul betul rusakah atau memang sudah harus dipelihara, atau bagaimana. Kita tidak ingin terpaku kepada data saja. Untuk seluruh wilayah provinsi kita tetap usulkan untuk program dan kegiatan inspeksi ini. Ya paling tidak sekali setahun lah, selainitu kita juga bisa melihat langsung dan bisa membuat rencana untuk kedepan

terhadap apa yang kita temui dilapangan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Angraini Ekawati, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan bahwa perencanaan program inspeksi kondisi jalan dan jembatan ini terus diusulkan setiap tahunnya, hal ini bertujuan untuk tidak terpaku hanya kepada data atau laporan yang ada melainkan ingin mengsurvei langsung kondisi dilapangan dan dapat menjadi acuan, memilah, merencanakan, dan memprioritaskan jalan dan jembatan mana yang lebih diprioritaskan selanjutnya untuk dipelihara oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau.

2. Pelaksanaan Bidang Bina Teknik, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Setelah perencanaan selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam manajemen adalah mewujudkan rencana tersebut dengan menggunakan pelaksanaan – penggerakan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan.

Dalam hal ini Dinas Bina Marga Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai Dinas Bina Marga Provinsi Riau melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan.

2.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan

Rehabilitasi adalah pekerjaan yang diperlukan bila pekerjaan pemeliharaan

rutin secara teratur harus dilaksanakan tersebut diabaikan atau pemeliharaan berkala terlalu lama ditunda sehingga keadaan lapisan permukaan semakin memburuk. Pekerjaan rehabilitasi menyangkut pekerjaan jalan yaitu peningkatan jalan.

Sebagaimana wawancara dengan Ibuk Angraini Ekawati, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan mengatakan :

“Untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ini seperti yang sudah dijelaskan kita masih sifatnya memprioritaskan kerusakan berat, dan kegiatan pemeliharaan ini tergantung anggaran yang tersedia, sudah kita pilah mana yang sekiranya lebih diprioritaskan dan kita buat perencanaan kegiatan belum tentu semua bisa kita laksanakan. Seperti program rehabilitasi ini kan kegiatan nya banyak ya pemeliharaan rutin dan berkala, itu beda lagi kegiatannya pemeliharaan rutin dan berkala.”(02 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Angraini Ekawati, ST.,MT bahwa pemeliharaan jalan dan jembatan ini masih bersifat prioritas, dimana pelaksanaan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan banyak kegiatan dan setiap pemeliharaan berbeda beda bentuk kegiatan yang dilakukan.

Pada jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Siak pada Tahun 2017 belum sepenuhnya mendapatkan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sebagaimana wawancara dengan Ibuk Angraini Ekawati, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan mengatakan :

“kalau jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Siak sebenarnya pada tahun 2017 itu sudah ada kita

buat perencanaan kegiatan, tapi kan disini kita melihat lagi ruas mana yang paling dibutuhkan dilakukan penanganan, ada beberapa itu ya perencanaan kegiatan sekitar tujuh kegiatan tapi memang tidak semua kegiatan bisa kita laksanakan.”(02 November 2018)

Adapun kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang terlaksana pada ruas jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Siak sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Siak Tahun 2017

No	Kegiatan	Target
1	Pemeliharaan Jalan Simpang Beringin – Simpang Maredan – Simpang Buatan	2 Km Berkala 25 Km Rutin
2	Pemeliharaan Jalan Simpang Minas – Simpang Pemda – Simpang Tualang Timur	1 Km Berkala 20 Km Rutin

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari enam perencanaan kegiatan dari program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan hanya dua yang terlaksana di jalan dan jembatan di Kabupaten Siak, sebagaimana wawancara dengan Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mengatakan :

“hanya dua kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Siak, itu berupa pemeliharaan rutin dan berkala, pemeliharaan rutin itu kegiatannya berupa peaching dan pemeliharaan bahu jalan, kalau berkala itu kegiatan nya berupa

overlay saja yang baru terlaksana masih banyak lagi sebenarnya tapi Cuma kegiatan tersebut saja yang baru bisa kita lakukan.”(16 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I bahwa kegiatan pemeliharaan rutin berupa *peaching* dan pemeliharaan bahun jalan sedangkan berkala hanya dilakukan *overlay*.

2.2 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Pelaksanaan inspeksi jalan dan jembatan merupakan kegiatan Survey, Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mengatakan :

“kegiatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan ini contohnya IMRS, BMS, dan Leger. Untuk survey sendiri itu kila lakukan hanya setahun sekali dan dilakukan perawatan jika diperlukan dan memang kita wajib melaksanakan ya minimal sekali setahun untuk menentukan progres selanjutnya.”(16 Januari 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dapat kita lihat bahwa pelaksanaan dari program kerja bidang jalan dan jembatan telah dilakukan karena sifatnya wajib untuk menilai jalan dan jembatan mana yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk tahun selanjutnya.

Kegiatan berupa inspeksi kondisi jalan dan jembatan ini merupakan kegiatan survey ke seluruh ruas jalan dan jembatan yang ada di Provinsi Riau sebagaimana wawancara dengan Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan

Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mengatakan :

“inspeksi jalan dan jembatan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi seperti kegiatan IMRS, kegiatan ini berupa peninjauan, survey ke seluruh ruas jalan provinsi yang ada di Provinsi Riau, inilah sebagai acuan program kerja kita untuk tahun selanjutnya, karna kita melihat menilai sendiri bagaimana kondisi jalan tersebut, kita pilah mana ruas yang sekiranya perlu untuk kita prioritaskan untuk kita pelihara kita juga tidak terfokus pada data yang ada saja jadi kita juga survey sendiri melihat bagaimana kondisi di lapangan. karna maklum lah namanya jalan ini kan dilalui setiap waktu, jam, menit detik kan, siapa yang bisa menjamin kalau kita survey tahun ini kondisinya baik tahun depan kondisinya masih sama, jangankan setahun sebulan kedepan saja dari yang kondisinya baik bisa hancur, jadi disitu kadang kita agak sulit. Sama juga dengan BMS bedanya BMS ini untuk jembatan.”(16 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I menjelaskan bahwa kegiatan dari inspeksi kondisi jalan dan jembatan ini kegiatan berupa survey, IMRS untuk jalan BMS untuk jembatan, hal ini sebagai acuan dinas untuk perencanaan program tahun selanjutnya dan memilah ruas yang lebih diprioritaskan.

Kegiatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Siak untuk tahun 2017 sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mengatakan :

“untuk kegiatan inspeksi jalan dan jembatan untuk kabupaten siak itu kalau tak salah tahun 2017 ada kita survey, tapi memang yang paling berat kerusakannya daerah simpang pemda sampai jembatan, lalu di simpang beringin, jadi itu saja yang masuk untuk kita prioritaskan, karna kan anggaran juga problemnya. Tapi untuk tahun ini ada lima ruas dua jembatan untuk kabupaten siak kalau tak salah saya.” (16 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanusi, ST., MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I menjelaskan bahwa kegiatan inspeksi kondisi jalan pada ruas jalan dan jembatan di Kabupaten Siak untuk tahun 2017 hanya dua ruas jalan yang di prioritaskan, sedangkan pada ruas jalan di Kabupaten Siak hampir sebagian besar mengalami kerusakan baik ringan, sedang, maupun berat.

3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jalan dan Jembatan

Pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan berjalan dengan standar yang ditetapkan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk melihat perkembangan program secara keseluruhan, baik untuk pencapaian program dan sasaran program guna memelihara jalan dan jembatan.

Dari pelaksanaan dua program tersebut Dinas Bina Marga mempunyai tugas untuk memantau, mengevaluasi dan juga melaporkan bidang jalan dan jembatan. Kegiatan terhadap dua program ini dilakukan dari masa pengerjaan hingga sesudah pengerjaan kegiatan pemeliharaan jalan.

3.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perlu adanya pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau, khususnya program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Siak.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sanusi, ST, MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mengatakan :

“untuk pemantauan pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sendiri itu kita lakukan dari mulai pengerjaan, masa pengerjaan sampai pengerjaan selesai, karna kita ikut andil ya ingin tau bagaimana prosesnya berjalan dengan baik atau tidak, khususnya pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, karna ini kan prosesnya lumayan lama dan memakan waktu, kita juga tidak mau pengerjaan nya asal asalan. Kita juga tidak mau baru saja kita pelihara atau rehab tidak lama kemudian terjadi lagi kerusakan. Selain itu kita menghindari ada nyab keterlambatan penyelesaian pekerjaan rehabilitasi, ditakuti adanya kelalaian dari pihak pekerja, atau bisa saja ada kendala dari luar, bisa karna cuaca, material yang tidak datang tepat waktu, dan lain lain.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanusi ST, MT bahwa pemantauan terhadap program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan dari mulai pengerjaan, masa pengerjaan dan sampai pengerjaan selesai.

3.2 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan ini bersifat keseluruhan dan dilaksanakan minimal sekali setahun, sebagaimana wawancara dengan Bpk Sanusi, ST, MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mengatakan :

“dalam program inspeksi kondisi jalan dan jembatan ini bersifat keseluruhan untuk provinsi riau, dimana kegiatan ini lebih bersifat memantau, dan mengecek langsung bagaimana kondisi jalan dan jembatan provinsi yang ada di Provinsi Riau. Kegiatan ini kita lakukan paling tidak sekali dalam setahun. Setelah kita pantau barulah kita tau mana jalan yang sekiranya perlu kita prioritaskan untuk kita rehab.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanusi ST, MT bahwa kegiatan dari program inspeksi kondisi jalan dan jembatan ini bersifat pemantauan langsung dan mencakup seluruh wilayah yang ada di Provinsi Riau.

Secara keseluruhan monitoring merupakan salah satu fungsi pengawasan pada sebuah program adalah menilai apakah pelaksanaan program Pemerintahan telah dicapai dengan baik atau sebaliknya. Bentuk penilaian program kerja bidang jalan dan jembatan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sanusi, ST, MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mengatakan :

“Pemantauan atau pengawasan secara keseluruhan dalam kegiatan pemeliharaan jalan diawasi oleh seluruh stakeholders, karena SKPD terkait telah melakukan transparansi informasi melalui laporan hasil kerja yang dibuat. Kalau semasa kegiatan berlangsung kita tetap ikut turun ke lapangan melihat bagaimana pengerjaan kegiatan, apakah

berjalan baik atau tidak, apakah sesuai dengan kegiatan yang kita arahkan. Tapi setelah masa kegiatan selesai sekitar enam bulan itu masih dalam jaminan penyedia, kalau seandainya setelah masa kegiatan ada kerusakan itu masih tanggung jawab dari penyedia. Nanti itu tim kita yang turun untuk melihat apakah sudah mulus atau sudah baik kondisi jalan yang sebelumnya di pelihara namanya tim pho yaitu pemeriksaan hasil pekerjaan 100% kalau pemeriksaan jaminan enam bulan berikutnya itu ada tim fho yaitu jaminan tim pemeliharaan, tapi biasanya orang yang ditunjuk itu sama, supaya sk nya tidak banyak, kita bidang yang mengusulkan kepala dinas yang mengeluarkan sk nya. Setelah semuanya beres baru bisa dana untuk penyedia kita cairkan.”(16 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I bahwa pengawasan dilakukan dalam masa pekerjaan pemeliharaan dan setelahn masa pemeliharaan selesai.

Sedangkan untuk monitoring secara umum seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mengatakan :

“kita tetap memantau dari aspek lain selain dalam masa pemeliharaan kita juga punya web resmi untuk masyarakat dimana masyarakat bebas memberi tahu keluhan, selain itu kan tadi juga ada kita adakan survey untuk melihat kondisi jalan dan jembatan tapi ya tidak bisa sering ya minimal setahun sekalilah, karna kan ruas jalan provinsi di riau lumayan ya ada 80 ruas dan yang rusak bukan sedikit hampir di

setiap ruas ada kerusakan. Tapi kita sudah coba untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa sedikit meminimalisir kerusakan yang diakibatkan faktor tertentu.” (16 Januari 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dapat dilihat bahwasanya sudah dilakukan pemantauan tidak hanya dalam masa kegiatan pemeliharaan dilakukan tetapi juga dilakukan secara umum melalui web resmi yang dibuat agar masyarakat dapat memberi tahu keluhan atau permasalahan yang ada guna untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun pemantauan atau evaluasi yang dilakukan Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sanusi, ST.,MT sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mengatakan :

“kegiatan evaluasi berupa pelaporan hasil kerja selama dilapangan baik dari hasil pekerjaan kegiatan pemeliharaan jalan maupun yang di dapat dari unit pelaksana maupun dari masyarakat, dalam hal ini kita juga membuka ruang seluas luasnya untuk masyarakat menilai atau mengevaluasi melalui layanan pengaduan masyarakat khususnya untuk masalah infrastruktur bisa melalui email, website resmi Dinas Bina Marga Provinsi Riau.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.T sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I bahwa selain mengevaluasi dengan laporan yang didapat dari hasil pekerjaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dan unit pelaksana dinas juga memberi ruang seluas luasnya bagi masyarakat umum dalam memberi

penilaian atau evaluasi program pembangunan jalan secara langsung sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya wadah bagi masyarakat untuk memberi pengaduan terhadap apa yang terjadi di lapangan yang ditujukan kepada Dinas Bina Marga Provinsi Riau melalui mekanisme layanan pengaduan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau berbentuk pemantauan monitoring dan evaluasi. Pemantauan yang dilakukan Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada program rehabilitasi adalah dari masa pengerjaan hingga sesudah pengerjaan kegiatan pemeliharaan jalan sedangkan untuk program inspeksi jalan dan jembatan bersifat memantau yang dilakukan setiap tahun untuk seluruh wilayah Provinsi Riau. Secara umum Dinas Bina Marga Provinsi Riau juga memonitori dari jauh dan menerima segala laporan dari masyarakat melalui web yang disediakan oleh pihak dinas agar dapat mengetahui apa saja yang terjadi di lapangan. Selain itu juga mengevaluasi setiap tahun kinerja dan pencapaian selama setahun pekerjaan agar dapat menjadi acuan untuk tahun selanjutnya agar lebih baik lagi dalam mencapai tujuan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau berbentuk pemantauan monitoring dan evaluasi. Pemantauan yang dilakukan Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada program rehabilitasi adalah dari masa pengerjaan hingga sesudah pengerjaan kegiatan pemeliharaan jalan sedangkan untuk program inspeksi jalan dan jembatan bersifat memantau yang dilakukan setiap tahun untuk seluruh wilayah Provinsi Riau. Secara umum Dinas Bina Marga Provinsi Riau juga memonitori dari jauh

dan menerima segala laporan dari masyarakat melalui web yang disediakan oleh pihak dinas agar dapat mengetahui apa saja yang terjadi di lapangan. Selain itu juga mengevaluasi setiap tahun kinerja dan pencapaian selama setahun pekerjaan agar dapat menjadi acuan untuk tahun selanjutnya agar lebih baik lagi dalam mencapai tujuan.

2. Saran

Peran Dinas Bina Marga Provinsi Riau diharapkan dapat secara maksimal melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam hal ini kegiatan pelaksanaan Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, harus lebih menekankan pada skala prioritas penanganan berdasarkan Prosedur Standar Teknis Penangan Jalan dan Jembatan serta Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Dinas Bina Marga Provinsi Riau perlu melakukan Koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait guna bekerja sama dalam menjaga keutuhan bangunan jalan dan jembatan. Selain itu pemantauan atau monitoring perlu secara mendalam lagi pada setiap kegiatan, sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh informasi data jalan dan jembatan dalam setiap kegiatannya yang dilakukan setiap hari, yang selanjutnya dapat mempermudah pada kegiatan Evaluasi Program diakhir nanti.

Kekurangan anggaran diharapkan Pemerintah Provinsi Riau dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pada Jalan dan jembatan Provinsi wilayah Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

Praktik. cetakan ke-14. Jakarta : Rineka Cipta.

Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I* Jakarta : Bumi Aksara.

Nurjaman, Asep & Krisno, Hadi. 2001. *Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Moelong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Paulus, Wiroutomo. 2003. *Pokok – Pokok Pikiran Sosiologi David Berry (Terjemahan buku The Principles of Sociology karya David Berry)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

R. Terry. George. 2013. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Bandung : Bumi Aksara

Rasyid, Ryaas. 2004. *Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*. Jakarta : Djembatan.

Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djembatan.

Soerjono, Soekamto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Subiyantoro, Arief. 2007. *Metode Dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Syafei Inu, Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Tjandra, W. Riawan. Dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.

Thoha, Miftah. 2003. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wiratama, Cahya. 2002. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations and Marketing*. Bandung: PT Bentang Pustaka.

Jurnal:

Robi Marwanaya. 2016. “*pengawasan Infrastruktur Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru*”. Jurnal Online Mahasiswa FISIP UR, Vol. 3 No. 2.

Ulvi Fandri. 2016. “*Pengawasan Pemeliharaan Jalan Oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang*”.

Internet

<https://m.goriau.com/berita/siak/lampu-jalan-sudah-tak-hidup-jembatan-maredan-jadi-lokasi-asusila-di-siak.html>, (diakses 25 agustus 2018)

<https://www.google.co.id/amp/pekanbaru.tribunnews.com/amp/2017/01/22/jalan-provinsi-riau-di-kabupaten-siak-mengancam-keselamatan-dinas-pus-siak-pasang-rambu>, (diakses 27 agustus 2018)

<https://www.antarariau.com/berita/86343/teruk-kelebihan-muatan-jadi-penyebab-rusaknyajalan-provinsi-di-siak>, (diakses 02 september 2018)

Perundang-Undangan :

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan